

**Lubuk Larangan, Etnosains dan Literasi Lingkungan dalam Mewujudkan
Pembangunan Berkelanjutan**

Purwanto Putra

Pendahuluan

Peristiwa banjir (dan longsor) menyambut lembar baru awal tahun 2020, kondisi ini masih terus berlanjut di beberapa wilayah Tanah Air. Kondisi yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan dan cukup menyedot animo publik jagat sosial media dan layar kaca kita –wabil khusus untuk wilayah DKI Jakarta, Bogor dan Banten. Sudah banyak tertuduh sebagai biang kerok bencana alam tersebut, mulai dari tafsir ekologis, geografis, sosial kultural hingga mistis sambung menyambung mewarnai obrolan.

Kiranya sah saja, setiap orang tentu berhak membangun argumennya. Sederhananya tuduhan bisa dialamatkan pada turunnya hujan deras dengan volume air yang berlebih-lebih termasuk anomali cuaca dan perubahan iklim. Namun jika mau menelaah secara akal sehat, andil faktor manusia tetap menjadi "donatur" utama pada bertambah-tambahnya akibat dan kerugian atas ketidakmapunan dalam mengelola jatuhnya air.

Memang ada kesalahan dalam sistem tata kehidupan dan berperilaku kita. Hingga membawa kerugian yang tidak sedikit pada aspek kemanusiaan dan alam itu sendiri. Harmonisasi antara kedua subyek-obyek itu kian hari sudah semakin terkikis habis. Harusnya keaneka ragaman kekayaan bangsa Indonesia, baik yang berwujud benda maupun nonbenda, jika dimaksimalkan pemanfaatannya akan menjadi solusi untuk mengatasi berbagai persoalan yang mendera bangsa ini.

Pengetahuan lokal (*local knowledge*) pada hakikatnya memiliki urgensi dan peran vital dalam mengatasi persoalan terkait lingkungan. Perlu ada revitalisasi untuk elemen tersebut agar jangan sampai punah apalagi dengan sengaja dipunahkan. Disadari atau tidak telah berlangsung semacam kegentingan etika atas eksistensi pengetahuan lokal dan jikapun ada sudah semakin tersembunyi jauh. Harusnya ada kesadaran memaksimalkan pendayagunaan pengetahuan lokal untuk menghadapi berbagai ancaman lingkungan yang kemudian dibalik sebagai potensi mensejahterakan masyarakat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Kenyataannya, selama ini memang masih minim pelibatan masyarakat atau jikapun ada tetap saja belum berbasis masyarakat.

Mengambil contoh sederhana, misalnya saja dalam hal pengelolaan sungai. Jamak kita temui bagaimana kondisi pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang notabene melintasi desa-desa kita, hampir keseluruhan proyek irigasinya dibangun oleh pemerintah, coba dibandingkan ada berapa banyak irigasi sungai yang sekarang ini

masih dibangun secara swadaya masyarakat. Kearifan lokal kita pernah mengajarkan pembangunan yang secara praktis juga memberi kebermanfaatannya langsung terhadap masyarakat seperti *lubuk larangan*. Melalui *lubuk larangan* yang notabene merupakan DAS hasil swadaya masyarakat, sudah jelas terbukti akan lebih terpelihara karena masyarakat merasa memiliki dan menjadi bagian atas sumberdaya itu. Sementara, kecenderungannya jika hasil pembangunan tersebut dalam prosesnya tidak melibatkan atau datang dari inisiatif masyarakat maka masyarakat kita tidak menganggapnya sebagai milik bersama yang harus dipertanggungjawabkan bersama dalam hal pemeliharannya. Terlebih lagi jika masyarakat tahu ada korupsi didalam pembangunannya.

Lubuk Larangan: Praktik Kearifan dalam Lokalitas Masyarakat

Bagi masyarakat minangkabau memandang alam sebagai guru, pemberi petunjuk dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, sebagai bentuk kebiasaan-kebiasaan alami yang tertuang dalam manifestasi budaya. Hal semacam ini melekat di dalam konsep kebudayaan Minang yang lebih dikenal dengan sebuah ungkapan *sikap alam takambang menjadi guru*.

Lubuk Larangan adalah bagian dari manifestasi bentuk pemanfaatan alam dengan mempertimbangkan unsur ekologis. Definisi secara etimologis, istilah ini terdiri dari dua kata yaitu *lubuak* yang diartikan sebagai bagian yang dalam dari sebuah sungai umumnya tempat berkembang biak bagi ikan. Larangan diartikan sebagai aturan yang melarang suatu tindakan. Ketika digabungkan, frase *lubuak larangan* dipahami sebagai suatu daerah sungai yang secara alami merupakan tempat berkembang biaknya ikan dan ekosistem air lainnya, yang mana pada daerah yang telah ditetapkan sebagai area terlarang untuk diambil hasilnya dalam periode waktu tertentu. Secara keabsahan area ini memang dikelola oleh masyarakat melalui landasan peraturan adat atau Nagari yang diterima bersama.

Kawasan *lubuak larangan* merupakan salah satu bentuk nilai kearifan lokal masyarakat Minangkabau (sekarang Sumatera Barat) dan beberapa daerah sekitaran aliran sungai yang masih bertahan sampai sekarang ini. Dalam makna sederhana hal ini dapat membuktikan bahwa kawasan daerah aliran sungai (DAS) masih memiliki kebermanfaatannya secara ekonomi dan kelestarian bagi masyarakat sekitar sehingga mereka tetap mempertahankannya agar ekosistemnya juga tetap terjaga.

Secara lebih mendalam ternyata masyarakat yang berada di sekitaran lingkungan *lubuk larangan* selain mereka memanfaatkan sungai untuk diambil hasil perikanannya juga menggunakan DAS untuk mendukung berbagai kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya. Sangai menjadi sarana untuk mendukung aktivitas sosial-budaya masyarakat. Memang saat ini sudah lumrah anggapan bahwa pranata-pranata semacam itu selalu diasosiasikan sebagai sesuatu yang tradisional dan tidak mengikuti perkembangan. Namun, pada kenyataannya ada kata kunci yang membuat mereka tetap mematumhinya. Dampaknya adalah positif berimplikasi secara berimbang pada keselarasan antara lingkungan dan pemenuhan kebutuhan keseharian.

Bahwa pelajaran yang dapat diambil adalah ada semacam nilai tata kelola pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan dan sungai di Minangkabau oleh masyarakat atas dasar prinsip-prinsip pengaturan bersama, kerja sama dan saling berbagi dalam konteks sosial produksi. Cara itu masih layak dipertahankan untuk pranata yang bersifat individu atau kelompok. Pertimbangan sederhananya adalah kearifan lokal jika tetap dipertahankan maka akan memiliki nilai adaptif jangka panjang yang memungkinkan ragam kebudayaan untuk terus bertumbuh.

Secara praktik *lubuk larangan* memang sudah terbukti memiliki kadar nilai konservasi yang begitu kuat. Masyarakat di lingkungan tempat *lubuk larangan* dibuat biasanya akan menerapkan aturan adat dan Nagari sebagaimana manifestasi atas pengetahuan dan tindakan yang sudah berlangsung secara turun-temurun berbasis kearifan lokal. Para tokoh adat bersama masyarakat secara musyawarah mufakat akan mengatur tentang pembagian batas larangan menangkap dan memanen ikan. Kebijakan ini selain memiliki sangsi secara adat yang berlaku dalam lingkup lokalitas mereka saja. Namun ternyata di dalam perkembangannya juga dapat bersinergi dengan peraturan daerah (Perda), sehingga semakin berkekuatan hukum bagi yang melanggarnya. Kolaborasi tersebut juga mendorong pengunjung dari luar untuk turut menyesuaikan dan mengikutinya. Sinergi inilah yang menjadi kekuatan kunci agar lingkungan tersebut menjadi tetap lestari.

Etnosains Jembatan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Kearifan lokal selain memiliki muatan *indigenous knowledge* ternyata mengandung unsur *indigenous science*. Hakikat sebenarnya dari sains itu sendiri berasal kata latin "*scientia*" yang berarti pengetahuan atau pemahaman mendalam. Pendalamannya bisa terletak pada pengetahuan sistematis dan tersusun secara teratur,

universal, terdiri atas kumpulan fakta dari observasi atau pengujian. Jika ditelaah dan diterapkan lebih lanjut di dalam kearifan lokal maka akan terkandung suatu konsep tentang bagaimana proses belajar masyarakat atas realitas yang mereka lihat dan rasakan.

Dalam proses pembelajaran dengan pendekatan *etnosains*, pembelajar tidak lagi terkungkung terhadap pandangan bahwa ilmu *sains* itu sebagai sesuatu yang asing dan terpisah dari budaya. Melalui *etnosains* bisa dialirkan suatu pandangan tentang budaya dan kearifan lokal yang sudah dikenali dalam kehidupan sehari-hari yang secara komprehensif juga memuat kaidah-kaidah dan pembuktian ilmiah. Melalui pendekatan *etnosains* ini pulalah kemungkinan transformasi dan rekonstruksi sains yang berasal dari pengetahuan masyarakat dapat menjadi sains ilmiah. Selanjutnya tentu dapat dikembangkan secara berkesinambungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan berorientasi lingkungan.

Disinilah kiranya dapat tergambar bagaimana cara berfikir masyarakat lokal berlangsung dari sesuatu yang paling unik yaitu perspektif budaya mereka. Untuk kemudian berdasarkan beragam kearifan lokal dapat dikembangkan menuju kajian ilmiah lebih lanjut mengenai *indigenous sciencenya* atau istilah lainnya disebut *etnosains* itu tadi. Menjadi sistem pengetahuan yang dikembangkan dari budaya untuk tujuan mengklasifikasikan objek, aktivitas dan fenomena. Diharapkan juga *etnosains* ini akan menjadi jembatan penghubung antara kearifan lokal dengan pembangunan berkelanjutan.

Literasi Lingkungan

Pembelajaran melalui etnosains bertujuan untuk membekali masyarakat dan pembelajar untuk memahami secara detail tentang lingkungan sekitarnya, yang mana dikenal juga dengan istilah literasi lingkungan. Kemelekan pada lingkungan dalam melakukan tindakan atau aktivitas yang mempertimbangkan kepedulian terhadap lingkungan.

Istilah literasi lingkungan ini sebenarnya bukanlah hal yang benar-benar baru dalam tradisi kita. Pertama kali diperkenalkan oleh Roth (1968) melalui artikelnya di jurnal *Massachusetts Audubon* (Mc Ride, Brewer, Berkowitz, & Borrie, 2013). Melalui penjelasan yang komprehensif Roth (1992) menyatakan bahwa literasi lingkungan adalah suatu kemampuan seseorang untuk memahami lingkungan sekitar dan berperan dalam upaya perlindungan, perbaikan dan meningkatkan kualitas lingkungan tersebut.

Pada hakikatnya literasi lingkungan dapat pula kita pahami sebagai pendidikan dasar bagi semua orang yang akan berbagi pengetahuan, keterampilan dan motivasi untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.

Maka dengan adanya literasi lingkungan sekiranya akan dapat diperoleh suatu pemahaman, keterampilan, dan motivasi secara komprehensif terhadap individu dan kelompok untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dengan mempertimbangkan hubungannya dengan sistem alam, komunitas, dan keberlangsungan bagi generasi mendatang. Literasi lingkungan diharapkan akan membekali masyarakat berkenaan dengan keteraksesan informasi secara ilmiah dengan pendekatan terpadu dan sistematis terhadap lingkungan. Melalui penerapan strategi literasi lingkungan diharapkan agar masing-masing individu dan masyarakat memperoleh bekal keterampilan dan kemampuan terkait informasi ilmiah yang kuat, kemampuan berpikir kritis, mampu melakukan pemecahan masalah secara kreatif dan strategis, dan memiliki kemantapan dalam pengambilan keputusan terhadap lingkungannya.

Thomas Lickona (2004) menjelaskan bahwa karakter yang baik adalah yang mampu mengetahui hal yang baik (*knowing the good*), menginginkan hal yang baik (*desiring the good*), dan melakukan hal yang baik (*doing the good*). Hal yang harus kita ingat juga dalam usaha untuk lebih memahami keterkaitan antara lingkungan, masyarakat, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk mempertimbangkan peran generasi *milenial* dan generasi mendatang untuk dapat ambil bagian berpartisipasi secara aktif dan berkesinambungan dalam pelestarian lingkungan ini. Hal ini akan semakin tertanam dan membudaya ketika mereka mendapatkan pendidikan literasi lingkungan secara benar dan proporsional.

Kepemimpinan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Bagaimana seorang pemimpin (pusat dan daerah) memahami visi dan misi pembangunan berkelanjutan dalam rangka membawa gerbong besar masyarakat Indonesia dan beserta alamnya. Pemahaman terbaik terhadap masyarakat dengan lokalitas dan lingkungannya adalah jalan terbaik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Tanah Air ini.

Legitimasi seorang pemimpin harusnya dapat pula diukur dari sejauh mana pemahamannya terhadap kenyataan kultural yang begitu beragam di nusantara kita. Jika ingin seutuhnya memahami realitas tersebut maka pemimpin harus bisa bertransformasi dari seorang politikus menjadi negarawan seutuhnya yang kemudian merangkai visi dan membuat aksi dalam konteks pembangunan nasional berkelanjutan secara akurat, efektif dan efisien.

Dengan modal dan kekuatan tersebut maka berulah sinergisitas antara kebijakan (pemimpin) dengan masyarakat yang berbasis kearifan lokal akan dapat menentukan arah pembangunan berkelanjutan kita dalam rangka menghadapi kemajuan. Kondisi ini sekaligus akan mengangkat kesejahteraan masyarakat kita agar dapat mengambil peran aktif dan mandiri menjadi produsen ketimbang hanya sebagai “korban” konsumerisme seperti yang dewasa ini sering terjadi.

Penutup

Kearifan lokal itu sekiranya dapat disederhanakan sebagai tradisi yang memuat perilaku (aktivitas atau kegiatan) yang secara terus menerus berproses, berlangsung, dipertahankan dan kedepan diimajinasikan untuk terus ada. Jadi hal perlu ditanamkan bersama bahwa kearifan lokal itu tidak diam, berkembang secara terus menerus. Selalu terdapat konsep-konsep yang secara dinamis dapat mengarahkan aktivitas dari masa lampau menjadi kreativitas dan inovasi di masa kini dan menjadi harapan mengada untuk kemaslahatan dimasa mendatang.

Kearifan lokal dan modernisasi hendaklah dipandang sebagai hal yang sifatnya tidak lagi dikotomis melainkan sebagai suatu kesinambungan yang selalu menuntut berbagai penyesuaian (pengembangan, penghilangan dan penghentian) agar bisa tetap terus ada. Kunci utama yang mesti diperhatikan demi terjaganya dan berperannya kearifan lokal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yaitu respon dari masyarakat itu sendiri, yang mana antara pelaku, pemimpin dan lingkungan itu sendiri kemungkinan akan selalu berada dalam situasi krisis yang akan terjang-menerjang.

Epilog singkat melalui analogi *lubuk larangan* ini semoga dapat menjelaskan keterhubungan antara kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan yang lebih tercerahkan. Kita dapat reflesikan bahwa masyarakat lokal bisa juga menjadi representasi dari ikan-ikan yang hidup di lubuk larangan, sebagai mana hakikatnya agar ikan tetap hidup dan tumbuh maka mereka akan terus berenang melawan arus. Arus

yang datang tidak akan selalu sama derasnya, selalu berubah dari waktu ke waktu dengan berbagai faktor.

Maka dari itu pemimpin harus bisa memastikan bahwa ikan-ikan memiliki kekuatan yang cukup agar dapat bertahan dan tidak terbawa arus. Prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar mewujudkan itu adalah ekosistem lingkungan yang terjaga. Hal itulah yang mesti menjadi sinergisitas kebijakan pimpinan dan masyarakat. Jika itu berjalan selain mendatangkan kesiapan untuk adaptif sekaligus mengantisipasi agar banjir bandang tak terjadi. Walaupun kekuatan ada, akhirnya tetap akan sama ketika banjir bandang menerjang semua tetap akan menjadi luluh lantah.

Biodata Penulis

Nama Lengkap: Purwanto Putra

Alamat : Jalan Nunyai Gang Subing VIII Blok C2 Perumahan Raja Ratu
Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung.

Email : purwanto.putra08@gmail.com

No. Telp Aktif : 087781521816

No. WhatsApp : 087781521816

Media Sosial : ig:@ppt_purwanto